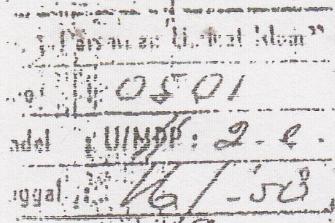


VITIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tertanggal 10 September 1958 No.JA.5/86/23



MENTERI KEHAKIMAN:

- i. surat perwakilan tertanggal 1 Juni 1958 dari Muhammad Djunaedi
Mansur dan Hadji Ahmad Nawawi, Ketua III dan Penulis dan bersama-sama
sama menjadi Pengurus, dan selaku itu dalam hal ini menjadi Wakil
perkumpulan tersebut dibawah ini;
- II. surat dab.;
Enginrat, dab.;

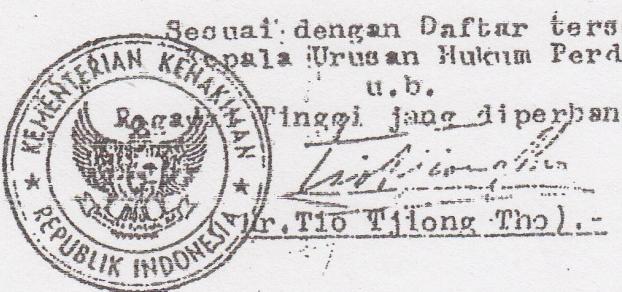
L E M U T U S Y A N:

Menjatakan bahwa Anggaran Dasar perkumpulan
"PERSATUAN UMMAT ISLAM" DENGAN DISINGKATKAN "P.U.I."

yang sejilih kedudukan biasa di Majalengka sebagai mana anggaran-dasar
nya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu meng-
kui perumusan tersebut sebagai badan hukum pada hari penyelesaian ang-
garan dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Indonesia;

VITIPAN dari Penetapan ini dikirim kepada perorangan untuk di-
sebutkan di akhir.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Urusan Hukum Perdata,
u.b.



Kepada
th. Tuan Hadji Ahmad Nawawi
Ketua III Umum Perkumpulan "P.U.I."
Djalanan P.U.I.
di
Majalengka,-

Nomor : AHU-2.UM.01.02-2664

Foto copy sesuai dengan aslinya

Jakarta, 2 SEP 2011

DIREKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Direktur Perdata,



No. : 1/10/24/05/018

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

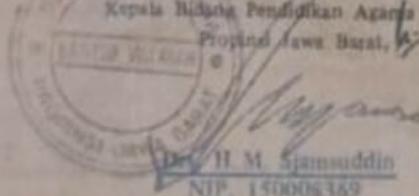
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1972, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|------------|----------------|
| 1. Nama | : | M.L. P.U.I. |
| 2. Alamat : | Jalan | : D.R.S.A. |
| | Desa | : JUNTIKELOH |
| | Kecamatan | : JUNTINGUAT |
| | Kab./Kodya | : INDRAHAYU |
| | Propinsi | : JAWA - BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | TAHUN 1948 |
| 4. Oleh | : | MASYARAKAT |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 - MARET - 1981.

s/si. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat,



Drs. H.M. Samsuddin
NIP. 150006369